

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke : 9
Masa Persidangan : I
Tahun : 2019
Pada hari : Kamis
Tanggal : 7 November 2019
Dimulai pada jam : 10.45 WIB.
Sampai dengan jam : 12.47. WIB.
Pimpinan Rapat : 1. Yunianto, SP - Ketua
2. Muh Amin, S.Ag - Wakil Ketua
3. Drs. H. Tunggul Purnomo - Wakil Ketua
4. Daniel Indra Hartoko, SE - Wakil Ketua
Sekretaris Rapat : N. Bagus Pinuntun. S.Sos. MM
Jumlah hadir : 38 orang dari 45 orang anggota DPRD
Tidak hadir : 7 orang anggota DPRD
Acara :
1. Pembukaan;
2. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD.
3. Penutup.

Pimpinan Rapat : Yunianto, SP (Ketua DPRD).

Jalanya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; atau yang mewakili

Yang kami hormati Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati beserta jajaran Eksekutif;

Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua BAWASLU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Para Direktur BUMD, Segenap hadirin, pemerhati Dewan, teman-teman Pers yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kita masih dipertemukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, guna melanjutkan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun.

Terima kasih dan selamat datang kami sampaikan kepada Saudara Bupati Temanggung, Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, Para Anggota DPRD dan semua pihak yang telah hadir memenuhi undangan kami, sehingga rapat paripurna DPRD dapat diselenggarakan.

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang DPRD telah hadir 38 orang anggota. Dengan demikian maka sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, rapat paripurna telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Seraya memohon Ridlo Allah SWT teriring bacaan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I tahun 2019, hari ini Kamis 7 Nopember 2019 pukul 10.45 WIB kami buka serta terbuka untuk umum ----- ketuk palu tiga kali.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD.
3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD :

Dapat !

Pimpinan rapat :

(ketuk palu 1 kali). Terima kasih.

Rapat DPRD dan Hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 4 Nopember 2019, DPRD menyerahkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung.

Sehubungan pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung telah selesai, maka hari ini akan kita ikuti Laporan tentang hasil kerjanya.

Mengawali acara ini kami minta kepada juru bicara Badan Anggaran DPRD untuk melaporkan hasil pembahasannya. Kepada juru bicara Badan Anggaran kami silahkan. --
----- Stop.

LAPORAN BADAN ANGGARAN OLEH SLAMET EKO WANTORO HADI
--

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Hirobbil Alamin wabihi nasta'inu ala umuriddunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasohbihi ajmain.

Kepada yang terhormat Pimpinan rapat dan para wakil ketua DPRD

Kepada yang terhormat Saudara Bupati Temanggung, Bapak-bapak dari Forum Komunikasi pimpinan daerah atau yang mewakili

Bapak Sekretaris Daerah, jajaran eksekutif di lingkungan sekretariat daerah, kepala dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan instansi pemerintah.

Bapak-bapak Camat yang saya hormati, direktur BUMD, Sekretaris DPRD, Insan pers pemerhati Dewan dan rekan-rekan anggota DPRD serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat Taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan tugas konstitusi dalam rangka pembahasan RAPBD 2020 di tingkat badan anggaran tanpa halangan suatu apapun.

Sholawat dan salam Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nabi akhiruzzaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok dizaumul khizamah.

Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati setelah pembahasan di tingkat komisi maka pembahasan selanjutnya dilakukan oleh badan anggaran pada rapatnya tanggal 4, 5, 6 November ini, Badan Anggaran telah melakukan beberapa kajian hasil laporan komisi komisi DPRD dan dinamika di badan anggaran ini cukup baik Artinya bahwa di sana ada beberapa hal yang harus kita cermati satu persatu dari usulan-usulan Komisi namun juga ada hal-hal yang sifatnya ini lebih difungsi koordinatif, hal-hal yang menjadi sorotan badan anggaran di dalam pembahasannya selama 3 hari yang pertama adalah di bidang pendapatan, jadi secara keseluruhan kita melihat Pendapatan asli daerah ini hasil pembahasan badan anggaran, laporan komisi komisi ini naik sekitar 5,5 miliar, yang awalnya kita tetapkan pendapatan asli daerah kita sebesar Rp.261.394.261.347 menjadi Rp.266.931.817.847. beberapa hal yang menjadikan kenaikan yang **pertama** ini dari deviden, deviden dari BUMD ini naik sekitar 1,9. Yang ke **dua** target RSUD meskipun sifatnya in out tapi kita pasang target dari awalnya 130 kita naikan menjadi 135 dan beberapa pendapatan di retribusi, ini hasil pembahasan komisi bisa diterima pada anggaran, justru ada yang menurun yaitu di penempatan awal pada retribusi pasar Parakan, awalnya kita tetapkan di APBD di RAPBD 4,96 tapi hasil evaluasi oleh badan anggaran bahwa yang bisa ditetapkan adalah bahwa yang sudah menjadi potensi pendapatan yaitu yang sudah mempunyai Surat Ketetapan retribusi daerah, ini yang sudah terjual yaitu sebesar 2,028 ini sehingga terjadi penurunan sekitar 2 miliar 50, 2,05 miliar. Beberapa pendapatan yang menjadi pembahasan di badan anggaran adalah termasuk ini kenaikan dari pajak PBB P2 ini harapannya karena kita melakukan kebijakan bahwa penyesuaian terhadap NJOP objek pajak di perkotaan dan perdesaan ini ini kita sangat rendah untuk Kabupaten Temanggung sehingga di 2020 nanti ada

kenaikan memang ini bukan suatu kebijakan populis ini, tapi memang harus kita sesuaikan maka dibutuhkan suatu sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman bahwa nilai jual objek pajak ini memang sudah saatnya kita naikkan, kita Temanggung ini sangat rendah dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar ini kalau di beberapa daerah di sekitar Temanggung rasanya sudah lebih tinggi dari di Temanggung, itu beberapa bidang pendapatan.

Terus di dalam APBD kita untuk pendapatan dana perimbangan tidak ada perubahan ada satu yang perlu saya sampaikan bahwa untuk pendapatan bantuan keuangan dari Propinsi ini belum dicantumkan, kalau dulu di PPAS kita menargetkan 128 miliar tapi di APBD kita menunggu kepastian dari bantuan keuangan ini karena bahwa sesuatu yang dicantumkan di APBD harus mempunyai suatu kepastian sampai saat ini informasi dari BPPKAD bahwa pembahasan di provinsi belum dilaksanakan.

Itu bapak Ibu sekalian jadi bahwa secara umum pendapatan kita mengalami kenaikan. Yang ke **dua**, ini tentang pembiayaan perlu saya sampaikan bahwa rencana penyertaan modal pada BUMD sebesar 15 miliar ini terpaksa tidak bisa dilaksanakan di 2020 Semoga nanti di perubahan bisa ini atau kita kebijakannya nanti 2021 sebesar 15 miliar, alasannya bahwa perda tentang roadmap penyertaan modal ini belum bisa di selesaikan, ini surat dari Bupati kepada DPRD kayaknya juga belum belum masuk sehingga kita harapkan bahwa Raperda roadmap penyertaan modal ini sesegera mungkin untuk bisa masuk dan dibahas oleh DPRD.

Bapak ibu sekalian yang saya hormati beberapa kegiatan 2020 yang banyak dibicarakan di badan anggaran yang pertama ini adalah penerimaan CPNS disana laporan dari Komisi A bawa Kabupaten Temanggung ini jumlah CPNS yang diterima terendah se Jawa Tengah, dari usulan sekitar 280 ini yang di 128 ini yang disetujui oleh Menpan RB ini hanya 37 orang, ini rendah sekali dibandingkan dengan kabupaten Cilacap ini yang CPNS nya yang diterima 850, dikonfirmasi kepada saudara Bupati bahwa memang keputusan dari Menpan RB ini sifatnya final tapi harapan kita bahwa nanti pemerintah daerah melakukan klarifikasi ulang sehingga untuk masa-masa yang akan datang bahwa Temanggung ini menjadi prioritas untuk penerimaan CPNS, karena bahwa kondisi ketersediaan pegawai di Kabupaten Temanggung ini sangat sangat kurang jauh dari kebutuhan yang ada, dan ini di iya kan oleh Bapak Bupati nanti akan melakukan surat melayangkan surat kepada Menpan-RB agar untuk tahun selanjutnya kita diperhatikan.

Yang kedua yang juga menjadi pembahasan yang agak panas di badan anggaran. Ini masalah Pilkades, kita tahu bahwa proses Pilkada sini sudah berjalan dan insya Allah 2 bulan lagi tanggal 9 Januari pelaksanaan nya ternyata bahwa Perda dan Perbup yang dibuat berdasarkan peraturan pemerintah yang ada ini mengalami banyak banyak kekurangan, potensi-potensi hal-hal yang potensi terjadinya kerawanan ataupun protes dari masyarakat ini sangat besar harapan dari Badan Anggaran bahwa agar segera melakukan beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Panitia tingkat kabupaten, dan nanti disosialisasikan kepada panitia di tingkat desa mungkin ini nanti menjadi bidang Tugas komisi A yang dalam waktu dekat untuk bisa melakukan koordinasi dengan mengundang panitia Kabupaten agar pemerintah daerah menginisiasi untuk membuat Pakta integritas terhadap calon calon kepala desa, ada beberapa desa yang sampai saat ini tidak bisa melaksanakan karena tidak mengajukan lamaran itu ada 5 Desa, laporan kemarin ini yang nanti akan ditunda sampai Tahun 2022

Selanjutnya yang juga menjadi bahan diskusi ini suatu hal kegiatan yang sangat bagus jadi bahwa ada instruksi dari Bupati tentang TPS Desa, jadi sekarang ini kan permasalahan sampah di Kabupaten Temanggung menjadi suatu hal yang sudah sangat luar biasa semua lahan terbuka ini sekarang menjadi tempat pembuangan sampah, apalagi di seberang jembatan, sehingga masyarakatnya banyak membuat spanduk di jembatan jembatan itu larangan untuk membuang tapi kebudayaan ini budaya yang ini sudah mengakar melekat pada diri pribadi maka instruksi Bupati untuk membuat tempat pembuangan sementara di semua desa ini menjadi suatu solusi semoga saja pelaksanaannya ini bisa sesuai dengan yang kita harapkan, ada beberapa kendala yang coba kita kaji bersama terhadap pelaksanaan pembuatan TPSD ini dan kayaknya ini tentang teknis dan sistem pelaksanaan yang akan di sampaikan kepada Desa sudah dibuat tentang petunjuk pelaksanaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup semoga saja ini bisa terlaksana karena ini menjadi suatu hal, di dalam pembahasan kemarin sempat kita singgung juga kemampuan tempat pembuangan akhir yang sekarang ada di Badran, ini kapasitasnya memang sudah mulai menipis, rencana 2018 kita mengadakan pengadaan tanah untuk pembuatan TPA Temanggung Utara, cuma sayang ini masih terkendala ada beberapa hal yang paling menjadi hambatan adalah bahwa harga tanah ini tidak sesuai dengan Aprikel harapannya kini menjadi satu prioritas karena di tahun ini tidak bisa dianggarkan maka ini menjadi suatu kegiatan prioritas di 2021, kebutuhan tentang menambah satu tempat pembuangan akhir ini karena jangkauan dan juga untuk menampung jumlah sampah yang luar biasa besarnya ini menjadi suatu keharusan.

Yang terakhir yang menjadi bahan pembahasab di badan anggaran ini tentang dana DBHCHT kebijakan bahwa dana DBHCHT ini agar mengampu semua wilayah se Kabupaten Temanggung ini menjadi suatu kesepakatan bersama, catatan dari komisi C jadi pemberlakuan pemberian bantuan kepada penerima DBHCHT ini tetap mengacu peraturan perundangan yaitu Bahwa agar tidak berturut-turut ini karena ini menjadi suatu ketentuan tentang belanja hibah dan juga tidak dari dua sumber yang berbeda untuk satu objek yang sama. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati beberapa hal isu-isu daerah yang sempat menjadi bahan pembahasan di badan anggaran.

Secara struktur jadi bahwa belanja di Kabupaten belanja APBD 2020 ini mengalami kenaikan yang awalnya di RAPBD kita tetapkan 1,958 trilyun ini bertambah 23,4 miliar sehingga pada APBD nantinya akan ditetapkan jumlah belanjanya menjadi 1 triliun 981 miliar ini yang kemarin sempat didiskusikan bahwa ada beberapa kegiatan yang menjadi kewajiban sesuai dengan pengantar Bupati, ini memang tidak masuk APBD tapi karena itu menjadi kewajiban daerah karena faktor hal-hal yang bersifat mendesak ataupun ada regulasi dari pusat termasuk didalamnya pembangunan Pasar Darurat untuk Kecamatan untuk Pasar Kranggan ini sehingga dimasukkan dan menambah beban APBD.

Demikian bapak Ibu sekalian yang saya hormati laporan pengantar untuk pembahasan badan anggaran selanjutnya akan saya bacakan keputusan badan anggaran tentang RAPBD 2020.

PEMBACAAN KEPUTUSAN BADAN ANGGARAN

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian laporan dari hasil pembahasan Badan Anggaran , kurang lebihnya dalam penyampaian sya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan rapat :

Kepada Juru bicara Badan Anggaran yang telah menyampaikan laporan hasil kerjanya kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Demikian tadi telah kita ikuti Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung tentang hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (4), huruf a, angka 1 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, setelah Badan Anggaran DPRD melaporkan hasil kerjanya, kita perlu mendengarkan Pendapat Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Kabupaten Temanggung tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD.

Mengawali Pendapat Fraksi kami persilahkan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan kami silahkan.

PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN OLEH Dra. TITIK WINARTI

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan rapat beserta para wakil ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yth. Saudara Bupati Kabupaten Temanggung

Yth. Forum komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yth. Sekertaris Daerah, asisten Sekda, serta jajaran eksekutif

Yth. Rekan – rekan anggota Dewan

Juga Para camat se kabupaten Temanggung yang hadir

Yth. Para pemerhati dewan, wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Puji syukur selalu kita panjatkan ke hadapan Allah Yang Maha Kuasa karena bimbingannya kita dipertemukan di tempat ini untuk mengadakan rapat Paripurna dengan selamat tanpa halangan suatu apapun.

Sidang yang terhormat,

Sesaat setelah kami mendengar laporan dari pelapor Badan Anggaran dan juga dari anggota Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Badan Anggaran, kami Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima dan menyetujui hasil keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor :7/Banggar/XI/TAHUN 2019, tanggal 7 November 2019, tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Terlepas dari arti persetujuan kami, ada hal yang akan kami sampaikan sebagai berikut:

1. Kabupaten Temanggung hanya mendapatkan 37 formasi CPNS, hal ini sangat memprihatinkan. Untuk hal tersebut kami Fraksi PDI Perjuangan berharap kedepan Bupati bersama OPD terkait untuk melakukan langkah – langkah yang riil,

sehingga alokasi CPNS Kabupaten Temanggung bisa lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan CPNS di Kabupaten Temanggung.

2. Penanganan / Pengelolaan Sampah

Dengan gagalnya pengadaan tanah Pemerintah Daerah untuk calon Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Temanggung utara di tahun 2018, apalagi dengan digalakkannya program TPSD (Tempat Pembuangan Sampah Desa). Kedepan Pemerintah Daerah harus benar – benar mewujudkan TPA Temanggung Utara. Sebab – sebab kegagalan pengadaan tanah Temanggung harus benar – benar menjadi pengalaman / pelajaran bagi Pemda untuk pengadaan tanah selanjutnya. Kenapa TPA Temanggung utara benar – benar sangat diperlukan? Hal ini dikarenakan Pemda mempunyai tanggungjawab untuk mengangkut sisa sampah dari TPSD setelah di pilah – pilah. Bisa dibayangkan manakala sampah – sampah di desa- desa daerah Temanggung utara harus diangkut ke TPA sanggarahan (Kranggan). Dan yang lebih urgen lagi Pemda bersama dinas terkait untuk memberikan sosialisasi dalam penanganan sampah tersebut terutama di Desa-desa karena kami komisi D terutama untuk yang pereode kemarin itu sidak ke Desa-desa masih banyak permasalahan, baru-baru ini saja ada di salah satu desa di Kecamatan Jumo, kami mohon ini benar-benar sosialisasi ke desa-desa.

3. Pilkades Serentak 216 Desa

Kegagalan beberapa desa untuk melaksanakan pilkades di karenakan antara lain :

- a. Tidak ada yang mendaftar
- b. Jumlah pendaftar memenuhi, tetapi ada yang tidak melengkapi persyaratan sampai batas waktunya, sehingga syarat minimal 2 calon tidak terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan kurang sempurnanya regulasi yang ada (belum bisa mengantisipasi manakala terjadi hal – hal tersebut diatas).

Kedepan perlu adanya penyempurnaan regulasi (terutama Perda dan Perbubnya), sehingga dalam pelaksanaan pilkades di tahun-tahun mendatang tidak terjadi hal seperti di atas.

4. Dinas Pendidikan

Dengan telah di anggarkannya anggaran program gerakan kembali ke sekolah, kami berharap pemerintah daerah aktif melakukan koordinasi dengan desa – desa, melalui Rt / Rw untuk mendata anak usia sekolah yang tidak sekolah di lingkungannya, sehingga dapat mempermudah penyaluran dan tepat sasaran.

5. DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)

Sesuai dengan PMK nomor : 222 / PMK. 07 / 2017 mohon kepada Bupati melauai OPD – OPD terkait untuk benar – benar melaksanakan program dan kegiatan yang

telah di plot – plotkan dengan pemerataan di wilayah pertembakauan dan non pertembakauan.

Demikian pendapat Fraksi kami, bila ada hal dan ucapan yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Wassalammualaikum, WR,WB

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, 07 November 2019

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, ketua Titik Winarti, sekretaris Ika Risqiwati, keduanya ditandatangani.

Pimpinan rapat :

Kepada juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah menyampaikan pendapatnya kami sampaikan terima kasih.

Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami silahkan.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA OEH UMI TSUWAIBAH
--

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yang Terhormat;

Yang terhormat Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yang kami hormati Saudara Bupati Temanggung

Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung

Yang kami hormati pula Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung

Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD, serta Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Yang kami hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung, serta

Para Anggota Dewan serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Alhamdulillah wasyukrulillah hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi yaitu rapat paripurna yang membahas Keputusan Badan Anggaran Nomor 7 tanggal 6 November tahun 2019 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.

Sholawat serta Salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di aumil khizamah.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang terhormat

Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi kami, juga ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Anggaran yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 ini, semoga jerih payahnya menjadi amal baik yang akan mendapat pahala dari Allah SWT.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang terhormat

Setelah mencermati laporan dari pelapor Badan Anggaran sesaat tadi, dan mendengarkan laporan dari anggota FPKB yang duduk dalam Badan Anggaran, maka kami dapat memberikan beberapa catatan dan saran sebagai berikut :

1. Terkait penanganan sampah, masalah sampah ini menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah lewat dinas terkait, karena daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPA) yang berada di Sanggrahan saat ini sudah hampir penuh dan diperkirakan tahun 2020 sudah melebihi kapasitas daya tampung (Over Load). Di samping itu kami melihat persoalan sampah ini tidak hanya di daerah kota tapi juga di daerah perdesaan, dan masyarakat berharap agar segera ada upaya kongkrit dari pemerintah daerah sebagai solusi terhadap masalah sampah ini. FPKB mendukung langkah Saudara Bupati yang telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pembuatan TPSD dan mohon agar di lakukan langkah teknis oleh Dinas terkait ada DLH, DKK dan DPU. karena jika tidak, maka akan menimbulkan masalah sosial dan lingkungan yang lebih serius.
2. Terkait dengan kenaikan iuran BPJS, sebagaimana diketahui hal ini memiliki dampak yang beragam baik bagi BPJS Kesehatan, Keberlangsungan JKN, dan masyarakat masing-masing daerah sebagai peserta. Dampak tersebut misalnya ; pindah kelas yang lebih rendah atau peningkatan jumlah peserta non aktif khususnya di segmen mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) dan Bukan Pekerja (PB). Akibat dari kenaikan iuran BPJS ini Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus menganggarkan sekitar 12. 4 M masih di tambah lagi untuk Kades dan Perangkat desa sekitar 3 M, sehingga total anggaran di APBD 2020 sebesar Rp. 30 M. Di sisi lain FPKB banyak menerima aspirasi, masukan dan keluhan dari masyarakat terkait regulasi, juklak dan juknis yang justru di rasakan makin sulit dan berbelit. Maka melalui kesempatan ini FPKB berpendapat ; pertama, Agar keputusan kenaikan iuran BPJS di tinjau kembali khusus untuk yang kelas 3. Kedua agar selalu di lakukan

evaluasi dan koordinasi antara pihak BPJS dengan Faskes untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap pasien BPJS.

3. Terkait pelaksanaan Pilkades serentak di 216 desa pada Januari 2020, FPKB melihat bahwa dalam pelaksanaannya sampai sejauh ini menyisakan banyak persoalan, utamanya kelemahan pemahaman pelaksana terhadap regulasi, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari panitia tingkat kabupaten ke panitia tingkat kecamatan dan desa, sehingga sangat berdampak serius bahkan dapat merugikan para bakal calon kades. Oleh karena itu FPKB mendorong agar persoalan yang terjadi di lapangan di sikapi dengan cepat, serius dan tetap berpegang pada aturan main yang ada. juga kurangnya sosialisasi dari panitia kabupaten maupun panitia tingkat desa.
4. Terkait dengan kuota atau formasi CPNS yang hanya 37 dari pengajuan awal 450, FPKB sangat menyesalkan kejadian tersebut. Dari informasi yang disampaikan bahwa kesalahan ini terjadi pada sistem input data di e-formasi kementerian PAN-RB. Oleh karena itu FPKB berharap ke depan Pemerintah daerah perlu mengawal dengan serius mulai dari proses awal permohonannya bahkan jika dimungkinkan pemerintah daerah perlu menagih kekurangan yang diakibatkan kesalahan sistem tersebut, mengingat sesungguhnya pemerintah daerah kita sangat kekurangan PNS utamanya tenaga pendidikan dan kesehatan.
5. Terkait dengan akan berlakunya Perda tentang retribusi pengelolaan pasar hasil revisi dari gubernur, dimana retribusi penempatan awal sudah tidak diperkenankan lagi dan diganti dengan sewa penempatan. FPKB berharap untuk los dan kios yang sudah ada SKRD-nya agar tetap dilakukan penarikan, dan terhadap los dan kios yang belum ada SKRD-nya agar dilakukan sosialisasi dengan benar sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan gejolak di antara pedagang.

Selanjutnya dengan memohon ridho dan petunjuk Allah SWT teriring bacaan Bismillahirrahmanirrahim FPKB menyatakan dapat menerima Keputusan Badan Anggaran Nomor 7 tanggal 6 November tahun 2019 tentang Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dengan komposisi sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 1.921.489.274.847,-
2. Belanja Rp. 1.981.489.274.847,-
3. Surplus/(devisit) Rp. (60.000.000.000,-)

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala

kesalahan dan kekhilafan semoga cepat diampuni Allah dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 7 November 2019

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung, ketua Mahzum ditandatangani, sekretaris Umi Tsuwaibah ditandatangani.

Pimpinan rapat :

Kepada juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah menyampaikan pendapatnya kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada juru bicara Fraksi Partai Golkar kami silahkan.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati Ketua rapat dan para wakil ketua DPRD

Yang kami hormati Saudara Bupati Temanggung

Yang kami hormati Para anggota FKPD atau yang mewakili

Yang kami hormati Saudara Sekda, para Asisten Sekda, Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Para Camat, dan Para Direktur BUMD dan Ketua KPUD

Para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan Pers dan rekan – rakan anggota DPRD yang berbahagia.

Sebelumnya perkenalkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa , atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal,afiat tanpa halangan yang merintang

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi Partai Golkar terhadap RAPERDA Kabupaen Temanggung tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.

Setelah mencermati dan mempelajari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, Fraksi Partai Golkar memberikan catatan sbb :

1. Pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah tentu tidak terlepas dari ketersediaan SDM dari sisi kuantitas, pemerintah Kabupaten Temanggung saat ini masih banyak kekurangan pegawai terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, guna mengatasi hal tersebut pemerintah daerah telah berupaya dengan mengajukan kebutuhan pegawai sebanyak 128 orang, namun sangat disayangkan dari jumlah tersebut hanya terealisasi 37 orang dikarenakan kesalahan sistem di Kemen PAN-RB, terkait dengan hal tersebut Fraksi Partai Golkar berharap ke depan BK PSDM agar mengawal jangan hanya selalu mengandalkan sistem saja.
2. Terkait dengan program Bupati tentang pengelolaan sampah di desa-desa dengan membangun tempat pembuangan sampah desa (TPSD) 15 m3 tiap 500 jiwa dan kelipatannya fraksi Partai Golkar setuju serta mendorong program tersebut untuk itu OPD yang membidangi harus secara serius menciptakan sistem dan manajemen pengelolaan sampah, mengingat beberapa keterbatasan diantaranya TPA yang hampir overload, ketersediaan SDM dan prasarana.
3. Pada bulan Januari 2020 akan dilaksanakan Pilkades serentak di sebanyak 216 desa. Dari sekian desa sudah ada beberapa yang bermasalah karena tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh landasan hukum yang digunakan. Saat ini sudah ditetapkan bakal calon tetapi karena penetapan bakal calon menjadi calon masih relatif panjang kalau tidak salah 6 Januari, maka resiko-resiko bissaja mungkin terjadi terutama bagi desa yang calonnya hanya dua orang, menyikapi hal tersebut, Fraksi Golkar berharap agar pemerintah daerah dapat meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi dengan cara selalu menjaga kondusivitas di daerah.
4. Untuk semua program dan kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan pada APBD terutama kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat agar segera dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Fraksi Partai Golkar dengan seraya memohon Rindho dari Allah SWT serta mengucapkan "Bismillahirrohmanirohhim" menyatakan dapat menerima dan menyetujui Keputusan Badan Anggaran No.7/Banggar/XI/ Tahun 2019 tanggal 6 November 2019, dengan perincian sbb

Pendapatan	Rp. 1. 921.489.274.847
Belanja	Rp. 1. 981.489.274.847
Defisit	Rp. (60.000.000.000)
Pembiayaan Netto	Rp. (60.000.000.000)

dan selanjutnya mengusulkan keputusan tersebut kepada rapat paripurna DPRD hari ini untuk mendapatkan persetujuan dan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Pendapat Fraksi Partai Golkar , terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirulkholaam, Wabillahi taufiq wal Hidayah.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 7 November 2019

Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Temanggung, ketua Slamet SE, sekretaris Ishadi, masing-masing ditandatangani.

Pimpinan rapat :

Kepada juru bicara Fraksi Partai Golkar yang telah menyampaikan pendapatnya kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya kami berikan waktu kepada juru bicara Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pendapat Fraksinya, kepada juru bicara fraksi Gerindra kami silahkan.

PENDAPAT FRAKSI GERINDRA OLEH CHAKIEM HARMOKO
--

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan

Yang Terhormat, Sdr. Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan,Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna ini dengan suasana penuh kedamaian, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi GERINDRA, perihal Rancangan Peraturan Daerah, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Fraksi GERINDRA mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Temanggung yang ke 185, semoga semangat Raden Tumenggung Aryo Djoyonegoro selalu menginspirasi para

pemimpin di Temanggung ini, agar kedepan Temanggung semakin mempunyai daya saing dengan kabupaten lain.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Laporan Badan Anggaran telah disampaikan, sebelum memberikan persetujuan Fraksi GERINDRA akan memberikan beberapa catatan, antara lain sebagai berikut :

1. BKPSDM

Terkait alokasi penerimaan CPNS tahun 2019, dimana Kabupaten Temanggung hanya mendapatkan alokasi 37 orang dari 450 orang yang diajukan. Jumlah tersebut adalah paling sedikit se-Jawa Tengah, bahkan di seluruh Indonesia. Fraksi GERINDRA berharap Pemerintah Daerah dalam hal ini BKPSDM lebih serius dan lebih intens mengawal pengajuan usulan CPNS tersebut, mengingat saat ini formasi penerimaan sudah berbasis elektronik sehingga formasi tersebut harus benar benar di kawal. Fraksi GERINDRA merasa prihatin karena pada formasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang tidak masuk, sedangkan kita mengetahui kondisi di Kabupaten Temanggung sangat kekurangan tenaga pendidik di berbagai satuan pendidikan begitu pula dengan tenaga kesehatan, Pemerintah Daerah harus mempunyai langkah strategis untuk menjawab tantangan ini.

2. Dispermades

Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak di 216 desa pada tanggal 9 Januari 2019 nanti, Fraksi GERINDRA berharap dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, aman tanpa eksek, dan sesuai dengan semangat memilih pemimpin di tingkat desa yang dapat melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Namun ada sedikit kekhawatiran terhadap Peraturan teknis tentang Pemilihan Kepala Desa. Perlu adanya pakta integritas yang ditanda-tangani bakal calon kades yang berisi sanksi ataupun kesanggupan denda apabila sebelum pelaksanaan mengundurkan diri dari pencalonan.

3. Badan Usaha Milik Daerah

Fraksi GERINDRA mengapresiasi kepada BUMD yang memasang target pendapatan tinggi, yang tentunya akan di ikuti oleh semangat kerja yang tinggi untuk pencapaian target.

Untuk Apotik Waringin Mulya, target pendapatan yang rendah perlu ditingkatkan, karena banyaknya apotik yang bisa menjual obat jenis yang sama namun dengan harga yang bisa lebih rendah menjadi salah satu kendala, Pemerintah Daerah dapat menekankan, bahkan mewajibkan untuk pembelian obat peserta BPJS ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk membeli obat di Apotik Waringin Mulya.

PD. Aneka Usaha, dalam upaya peningkatan pendapatan, kiranya perlu dukungan internal, salah satunya kemauan masing-masing OPD untuk mau menggunakan jasa percetakan Aneka Usaha.

Perlu kiranya dilakukan audit dengan ketelitian yang lebih akurat terhadap Badan Usaha Milik Daerah, apakah ada kiranya perusahaan di dalam perusahaan atau penyimpangan yang lain, jangan sampai kejadian yang lalu terulang pada BUMD yang lain.

4. DBHCHT

Fraksi GERINDRA mengapresiasi kenaikan DBHCHT, dan sepakat bahwa prosentasi khusus di bidang pertanian dengan pola : 75 % untuk daerah tembakau, 25 % untuk daerah non tembakau. Harapan kami DBHCHT tersebut dapat :

- a. Memacu pertumbuhan ekonomi petani baik dalam usaha budidaya tembakau maupun komoditas pertanian lainnya pasca musim tembakau.
- b. Meningkatkan kualitas tembakau sesuai dengan standar pabrikan.
- c. Mengalokasikan untuk infra struktur pertanian terutama dalam mengantisipasi kekeringan sebagai contoh pembuatan embung-embung di kawasan pertanian di lereng Sumbing, Sindoro, Prau.
- d. Dapat menekan biaya operasional petani baik pada saat panen maupun pasca panen, keterkaitan dengan pemenuhan infra struktur di bidang pertanian khususnya JUT dan pembuatan embung tersebut.

5. Rencana Pemerintah menaikkan tarif BPJS, berdampak besar terhadap anggaran pembayaran BPJS oleh Pemerintah Daerah untuk Penerima Bantuan Iuran, mohon kiranya dapat segera di upgrade data PBI, agar tepat sasaran, karena ada PBI BPJS yang sebelumnya layak menerima namun sekarang sudah meningkat kesejahteraannya sehingga mampu membayar sendiri.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Dengan ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020

1. Pendapatan	: Rp.	1.921.489.274.847,-
2. Belanja	: Rp.	1.981.489.274.847,-
Devisit	: Rp.	60.000.000.000,-
3. Pembiayaan Netto	: Rp.	60.000.000.000,-
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	: Rp.	75.000.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	: Rp.	15.000.000.000,-
Sisa Lebih Perhitungan	: Rp.	0,-

Fraksi GERINDRA dapat menyetujui dan menerima atas keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 7/BANGGAR/XI/2019, tanggal 6 Nopember

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020, serta mengusulkan dalam Rapat Paripurna ini agar mendapat persetujuan. Saudara Bupati, Fraksi GERINDRA akan mendukung dan mengawal dan sepenuhnya kebijakan dan rencana saudara Bupati dan Wakil Bupati untuk melaksanakan RPJMD 2018 – 2023.

Demikian Pendapat Fraksi GERINDRA ini kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf .

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Temanggung, 7 Nopember 2019

Ketua Fraksi Drs. Andoyo, sekretaris Indah Cahyani, S.Sos ditandatangani.

Pimpinan rapat :

Kepada juru bicara Fraksi Gerindra yang telah menyampaikan pendapat nya kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami silahkan.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN OLEH MAHBUB

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bismillahirromanirrohim Lillahi Robillalamin Assolatu wasalamu ala sayidina Muhammadin wa shobihi ajmain Amma ba’du.

Selamat Pagi – Salam Sejahtera untuk kita semua

Kepada yang terhormat.

Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kab. Temanggung

Saudara Bupati

Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) atau yang mewakilinya

Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kepala Dinas , Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.

Para Camat se kabupaten Temanggung

Para Direktur BUMD,

Sekretaris DPRD dan jajaran sekretariat DPRD

Insan Pers, Pemerhati Dewan,

Rekan-rekan Anggota DPRD dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kehadiran junjungankita

kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya termasuk kita sekalian.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pendapat fraksi. Dan Ucapan terima kasih juga apresiasi kami sampaikan pula kepada anggota Badan Anggaran DPRD beserta Bupati dan seluruh jajaran eksekutif yang telah bekerja dengan baik dalam melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2020.

Hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati

Setelah mendengar laporan dari pelapor Badan anggaran dan juga laporan dari anggota kami yang dudug di Banggar serta anggota Fraksi di masing-masing komisi, FPPP pada kesempatan ini akan menyampaikan pandangan atau pendapat terkait program atau kegiatan di masing-masing OPD yang sudah direncanakan. Karena hal ini sudah banyak kami sampaikan di pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna sebelumnya. Juga sudah dibahas di Rapat Banggar bahkan sudah dibahas di rapat Kerja Komisi dengan OPD-OPD mitra kerja Komisi.

Namun kami lebih menekankan memberikan pendapat terkait anggaran secara langsung. Sehingga setelah mendengarkan laporan Banggar DPRD Kabupaten Temanggung yang menyampaikan hasil pembahasan Raperda APBD TA 2020. Setelah proses panjang dan hasilnya adalah sbb :

1. Pendapatan sebesar Rp 1.921.489.274.847,- yang terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah Rp. 266.913.817.847,-
- Dana Perimbangan Rp. 1.185.543.845.000,-
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 469.031.612.000,-

2. Belanja sebesar Rp 1.981.489.274.847,-

3. Pembiayaan daerah yang terdiri dari :

- Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 75.000.000.000,-
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 15.000.000.000,-
- Pembiayaan Netto Rp. 60.000.000.000,-

Maka kami dari FPPP memberikan catatan, harapan dan masukan terkait dengan Raperda TA 2020 tersebut antara lain sebagai berikut :

1. FPP berharap agar setiap OPD pengelola Anggaran dapat bersungguh sungguh dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mengacu kepada prinsip efisiensi, efektivitas dan disiplin anggaran yang tepat waktu serta tepat sasaran sesuai apa yang telah direncanakan dan disepakati dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Fraksi PPP menyarankan kepada Bupati untuk perlu menyegerakan melakukan proses tender di Tahun 2020 nanti supaya pelaksanaan program pembangunan dapat dilakukan tepat waktu sehingga pemerintah lebih dapat melakukan pengawasan yang intensif terhadap para rekanan pelaksana untuk menjaga kualitas pekerjaan dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
3. APBD Tahun Anggaran 2020 ini, harus dapat secara tegas menyatakan keberpihakannya kepada pembangunan manusia melalui program dan kegiatan yang berorientasi pada upaya menurunkan angka kemiskinan serta berorientasi pada upaya peningkatan kualitas pelayanan dasar terhadap masyarakat.
4. Menurut hemat kami, APBD Tahun Anggaran 2020 ini, harusnya mampu menjawab keresahan yang senantiasa kami suarkan pada setiap kesempatan, terutama dalam agenda penyampaian pandangan umum Fraksi Fraksi. yaitu pemerataan pembangunan, atau disparitas dan kesenjangan pembangunan antar wilayah yang ada selama ini semakin hari semakin kecil.

Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini diakhir penyampaian pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan setelah mendengar laporan dari pelapor badan anggaran dan mendengarkan laporan dari anggota kami yang duduk di badan anggaran DPRD Kabupaten Temanggung maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat :

Dengan selalu memohon perlindungan kepada Allah SWT, dan disertai ucapan Bismillahirrahmanirrahim, FPPP bisa menerima dan setuju atas Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung No. 7/Banggar/XI/ Tahun 2019 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dengan Pendapatan sebesar Rp. 1.921.489.274.847, Belanja sebesar Rp. 1.981.489.274.847 dan defisit sebesar Rp. 60.000.000.000,- dan mohon kepada rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan semoga ada manfaatnya, ada kurang, salah dan khilaf dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Temanggung, 7 Oktober 2019

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, ketua Slamet Eko Wantoro, sekretaris Ahmad Syarif Yahya. Ditandatangani.

Pimpinan rapat :

Kepada juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang telah menyampaikan pendapatnya, kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi PAN Berkeadilan untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada juru bicara Fraksi PAN Berkeadilan kami silahkan.

PENDAPAT FRAKSI PAN BERKEADILAN OLEH BEJO TURSIYAM, SE

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bismillahirrohmanirohim Alhamdulillahirobilalamin asalatu wassalamu ala asrofil Ambiyai wal mursalin wa'ala alihi wa shobihi ajma'in Ashadualla Illaha Ilallah wa Ashadu anna Muhammadan abduhu warasuluh amaba'du.

Kepada saudara Bupati Temanggung yang saya hormati

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD

Yang terhormat Jajaran FKPD atau yang mewakili

Yang terhormat Saudara Sekda para asisten sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, para Camat Se Kabupaten Temanggung

Yang terhormat para direktur BUMD, Perusda di Kabupaten Temanggung

Yang Kami hormat dan kami cintai Rekan-Rekan Anggota Dewan, Rekan-rekan Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikat Rahmat hidayah serta inayah Nya sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Temanggung dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apa.

Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut nya dan mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan apa yg menjadi sunah2 nya, Aamiin.

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi Pan Berkeadilan untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dalam forum yang terhormat ini.

Tak lupa kami ucapkan selamat hari jadi Kota Temanggung yang ke 185 semoga Kabupaten Temanggung semakin gendem dan juga kami mengucapkan selamat hari Pahlawan yang ke 74, semoga para pahlawan mendapat balasan yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya, kami tidak akan pernah menya-nyiakan apa yang telah kau

berikan, terima kasih untuk segalanya, kami sebagai generasi penerus sudah bersiap diri untuk meneruskan semua perjuangan darimu.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya penyusunan APBD pada substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada di tengah masyarakat secara makro maupun mikro, sehingga dengan APBD yang tepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Melihat struktur APBD tahun 2020 yaitu:

Pendapatan : Rp. 1.921.489.274.847

Belanja : Rp. 1.981.489.274.847

Sehingga defisit : Rp. (60.000.000.000)

Pembiayaan netto : Rp 60.000.000.000

Dengan struktur ini fraksi PAN Berkeadilan meminta agar pemerintah daerah lebih cermat dan hati-hati dalam pelaksanaan kegiatan.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Setelah mendengarkan laporan dari pelapor badan anggaran sesaat tadi dan masukan dari anggota fraksi PAN BERKEADILAN Yang duduk di badan anggaran.

Dengan Ucapan "Bismillahirrahmanirrahim"

Maka Fraksi PAN Berkeadialan dapat menerima dan menyetujui Keputusan Banggar tanggal 6 November 2019 Nomor 7/Banggar/IX/2019 mengenai Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan Belanja Dareah tahun Anggaran 2020.

Namun demikian izinkan kami Fraksi PAN BERKEADILAN, memberikan catan-catatan terkait beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan Temanggung yang bersih seperti era 1970 an, diperlukan penanganan pengelolaan sampah yang serius dan profesional, karena menurut penyampaian dari DLH pada saat rapat dengan komisi dan banggar bahwa sampah yang di buang olah masyarakat Temanggung mencapai 400 ton/ hari dan yang dibawa ke TPA baru 60 ton/ hari arti nya baru 13% yang tertangani, sehingga ada 340 ton/ hari sampah dibuang bebas di lingkungan sekitar masyarakat kita. Maka

kami Fraksi PAN Berkeadilan mengapresiasi kepada Bupati Temanggung yang telah mengeluarkan surat edaran bahwa di tahun 2020, semua desa harus punya tempat pembuangan sampah sementara desa (TPSD), kami menyarankan untuk segera membentuk dewan sampah yang bertugas melakukan pencermatan, pemantauan kondisi di lapangan, dan membuat rekomendasi persampahan kepada pemerintah daerah, segera membentuk Satgas sampah yang bertugas menegakkan peraturan-peraturan khususnya persampahan, pemerintah daerah harus menyediakan lahan untuk TPA di Temanggung Utara bisa segera direalisasikan karena TPA yang di sanggrahan Kranggan akan penuh/tidak mencukupi 2 tahun lagi. OPD terkait juga diharapkan untuk melakukan langkah riil dalam melakukan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat.

2. Formasi CPNS yang diusulkan oleh BKPSDM sebanyak 450 ternyata ada kesalahan sistem di MENPAN RB sehingga hanya 37 formasi yang muncul di tahun 2019, itupun bukan formasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, untuk itu kami Fraksi PAN Berkeadilan berharap di tahun yang akan datang hal tersebut tidak terjadi lagi, dan jumlah formasi sesuai kebutuhan yang di minta.
3. Terkait Penggunaan Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) kami Fraksi PAN Berkeadilan berharap di sesuaikan dengan Permenkeu nomor 222/PMK.07/2017 tentang penggunaan, pemantauan, evaluasi DBHCHT BAB II bagian ke satu prinsip penggunaan pasal 2 poit 1. Untuk prosentase harus berimbang sehingga manfaatnya dapat dirasakan semua lapisan masyarakat.
4. Pemilihan kepala desa merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya kekuasaan. Sumber daya kekuasaan dalam bentuk sosial, kultural, sampai sumber daya ekonomi inilah yang menjadi generator dinamika konflik politik. Karena penyelesaian isu teknis seringkali dibersamai oleh pengelolaan mobilisasi sumber daya kekuasaan oleh para calon kepala desa dalam pemilihan langsung. Akibatnya dinamika konflik politik dalam pemilihan kepala desa seringkali meruncing menjadi konflik kekerasan dan anarkis. Oleh sebab itu, Fraksi PAN Berkeadilan berharap Pemerintah Daerah dapat mengantisipasi hal tersebut dengan menginstruksikan dilaksanakannya deklarasi Pilkades Damai di setiap Desa sebagai langkah awal, disertai dengan pengamanan yang ketat menjelang, pada saat dan pasca pelaksanaan Pilkades serentak, terutama pada desa-desa yang menurut analisis tergolong zona merah
5. Berkaitan dengan adanya beberapa hal yang menyebabkan beberapa desa harus menunggu Pilkades serentak berikutnya, maka konsekuensi logisnya adalah pada beberapa desa tersebut harus dipimpin oleh Pejabat Sementara Kepala Desa dalam

kurun waktu setidaknya 2 tahun. Sehubungan dengan hal itu, Fraksi PAN Berkeadilan berharap, Pemerintah Daerah dapat mendampingi desa-desa tersebut agar pembangunan di tingkat desa tidak terhambat. Hal ini karena tidak semua Pejabat Sementara Kepala Desa dinilai dapat melaksanakan amanah pembangunan secara maksimal, mengingat adanya keterbatasan kewenangan dalam mengatur roda pemerintahan.

6. Tenaga auditor di lembaga inspektorat masih jauh dari cukup, dari kebutuhan ideal 54 baru terpenuhi 15 orang. Sehingga APBD kita tidak aman dari penyelewengan, kebocoran, karena lemahnya upaya pencegahan dan kurangnya pengawasan. Oleh karena itu mohon kepada Bupati Temanggung untuk memberikan skala prioritas dalam penyusunan APBD 2021 nanti untuk memenuhi tenaga auditor baik secara kualitas maupun kuantitas, Agar APBD Temanggung kedepan terkawal dengan baik dan betul betul memberikan manfaat yg besar bagi masyarakat.
7. Pembangunan manusia seutuhnya selain menjadi amanah undang undang, juga menjadi visi misi mulai dari Presiden sampai Bupati, namun dalam musrenbang yang pekan ini sedang disusun ditiap kelurahan dan desa hampir tidak ada yang membuat program kegiatan menyentuh pada program peningkatan Iman dan Taqwa. Oleh karena itu Fraksi PAN Berkeadilan mendorong Bupati untuk merekomendasikan kepada seluruh Camat, Lurah dan Kepala desa untuk memberikan porsi minimal 10% dari APBDES untuk program tersebut. Yakinihanya dengan melahirkan manusia yang bertaqwa, berakhlak mulia, insya Alloh cita cita bangsa dan negara menjadi adil, makmur, sejahtera dan bermartabat akan bisa kita wujudkan.
8. Fraksi PAN Berkeadilan, meminta kepada kepala daerah memberikan komposisi anggaran yang adil untuk pembangunan diseluruh kecamatan, menghimbau kepada OPD dalam merencanakan program kerja agar bisa meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.
9. Setelah banggar DPRD melaksanakan pembahasan secara internal dengan Tim TAPD menyarankan kepada pemerintah daerah melalui dinas teknis agar dalam penyusunan anggaran kegiatan melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terlebih dahulu agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PAN BERKEADILAN terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Bulahi fi shabilihaq fastabikul choirot

Wassalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Temanggung, 7 Nopember 2019

Fraksi PAN Berkeadilan DPRD Kabupaten Temanggung, ketua H. Erda Wachyudi, SH, Sekretaris Bejo Tursiyam, SE. Keduanya ditanda tangani.

Pimpinan rapat :

Kepada juru bicara Fraksi PAN Berkeadilan yang telah menyampaikan pendapatnya kami sampaikan terima kasih.

Terakhir kami berikan waktu kepada Fraksi Nusantara untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada juru bicara Fraksi Nusantara kami silahkan.

PENDAPAT FRAKSI NUSANTARA

Bismillahirrohmanirohim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan.

Yth. Saudara Bupati Temanggung.

Yth. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakilinya.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Yth. Saudara-Saudara Kepala Instansi Vertikal, Para Direktur BUMD, Ketua KPU dan Saudara Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Yth. Saudara-Saudara Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Para Camat se Kabupaten Temanggung.

Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan, Kawan-Kawan Seperjuangan Pers, LSM, Pemerhati Dewan dan Tamu Undangan serta Hadzirin yang berbahagia.

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi NUSANTARA DPRD Kabupaten Temanggung, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur ke hadzirat Allah Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelenggarakan agenda konstitusional rapat paripurna dewan hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat serta damai dan sejahtera.

Hadirin yang berbahagia.

Sebelum saya melanjutkan pembacaan pendapat akhir fraksi, terlebih dulu Fraksi Nusantara mengucapkan Hari Jadi Kabupaten Temanggung yang ke 185, semoga Kabupaten Temanggung selalu dalam lindungan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi Temanggung yang selalu Tentrem Maren Gandem.

Saudara Ketua dan rapat dewan yang terhormat

Fraksi NUSANTARA telah mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 secara aktif dan intensif dengan segala dinamikanya mulai dari pembahasan di tingkat komisi-komisi dewan sampai pada pembahasan di tingkat badan anggaran dewan. Oleh karenanya setelah mendengar laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan oleh pelapor badan anggaran dewan sesaat tadi, maka dengan seraya memohon ridho dan petunjuk dari Allah SWT. dan diawali dengan mengucapkan Bismillahir rahman nirahiim Fraksi NUSANTARA menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Keputusan Badan Anggaran Nomor : 7/Banggar/XI/ TAHUN 2019 tertanggal 06 November 2019 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Saudara Ketua dan Rapat Dewan Yth.

Selanjutnya tanpa mengurangi arti persetujuan tersebut, Fraksi NUSANTARA menyampaikan beberapa saran dan pendapat sebagai berikut :

1. Menyikapi pelaksanaan Pilkades serentak di 216 desa di tahun 2020 yang prosesnya sedang berlangsung agar menjadikan perhatian, diantaranya:
 - a. Ketentuan dalam Perda No: 18 Tahun 2095 tentang ketentuan pernyataan tidak akan mengundurkan diri pada pencalonan Pilkades hendaknya diberlakukan tidak di mulai saat pendaftar sudah ditetapkan menjadi calon Kades, akan tetapi agar diberlakukan sejak mendaftarkan dan sudah menjadi Bakal Calon Kepala Desa, karena dapat menggagalkan pelaksanaan Pilkades manakala pendaftaranya hanya terdiri dari 2 orang pendaftar.
 - b. Terhadap Perbup nomor 53 tahun 2019 yang mengatur tentang persyaratan pencalonan Kepada Desa khususnya ketentuan yang mengatur bagi pendaftar yang pernah bekera di Lembaga Pemerintahan tentang keharusan melampirkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan di Lembaga Pemerintahan hendaknya dihapus saja karena dapat membatalkan pelaksanaan Pilkades
 - c. Pengaturan jadwal tahapan Pilkades tentang kesempatan melengkapi berkas lamaran bagi yang belum lengkap agar dipertimbangkan dengan adanya hari libur, karena instansi yang melayani pada hari libur tersebut tutup sehingga membuat Bacalon tidak bisa melengkapi persyaratannya.
2. Tentang Penggunaan dana DBHCHT agar pelaksanaannya benar-benar harus berpedoman pada aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan No: 222/

PMK.07/2017 tentang pedoman penggunaan dana DBHCHT. Fraksi NUSATARA berharap agar dana DBHCHT bisa dirasakan oleh masyarakat tidak hanya di wilayah pertembakauan saja, agar asas pemerataan pembangunan bisa dicapai dengan porsi yang proporsional dalam penerapannya.

3. A) Konsep pelayanan persampahan, hal ini sesuai surat edaran Bupati pada tahun 2020 setiap desa harus ada TPSD dengan rasio per 500 penduduk jiwa dibutuhkan lahan 15 m². Untuk itu perlu adanya sosialisasi dari DLH terkait dengan pembuatan TPSD tersebut ke desa-desa termasuk tentang pengelolaan sampah, bangunan/konstruksi secara teknis.
B) Tentang Rencana Pemerintah Daerah untuk pengadaan lahan TPA yang dulu direncanakan di daerah Temanggung utara sampai sekarang belum terealisasi, untuk itu Fraksi NUSANTARA menghimbau agar pengadaan lahan untuk TPA perlu diprioritaskan, mengingat TPA yang ada di Sanggrahan sudah overload penampungannya hanya muat sampai 2020.
4. Terkait Penerimaan CPNS tahun 2019 sesuai usulan Bupati 450 uota sudah disesuaikan dengan jumlah pensiun ternyata hanya terealisasi 37 kuota dengan alasan mis sistem, untuk itu Fraksi NUSANTARA menghimbau agar di tahun mendatang tidak terjadi lagi, dan dengan harapan di tahun 2021 dalam hal ini Pemkab bisa mengusulkan penerimaan CPNS jumlahnya dua kali dari usulan tahun 2019. Dan agar OPD yang bersangkutan BKP-SDM selalu mengawalinya dan tidak hanya mengusulkan saja.
5. Fraksi NUSANTARA mengapresiasi kepada TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung yang telah melaksanakan pembahasan dan penetapan APBD tahun 2020 lebih awal. Namun demikian Fraksi NUSANTARA mengharap kepada saudara Bupati agar pelaksanaan semua kegiatan bisa dilaksanakan lebih awal agar semua kegiatan terlaksana secara maksimal apalagi yang menyangkut belanja modal.

Hadirin yang berbahagia

Demikian Pendapat Akhir Fraksi NUSANTARA terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatannya kepada kita semua dalam mengemban amanat rakyat.

Mohon maaf bila ada salah, akhir kata Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan rapat :

Kepada juru bicara fraksi Nusantara yang telah menyampaikan pendapatnya kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Demikian tadi telah kita ikuti Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung tentang hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD dimaksud, maka kami simpulkan sebagai berikut :

- 1. Menerima Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 7/Banggar/XI/Tahun 2019 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.
- 2. Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan ringkasan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.921.489.274.847.
a. Pendapatan Asli daerah	Rp. 266.913.817.847.
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.185.543.845.000.
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp. 469.031.612.000.
2. Belanja Daerah	Rp. 1.981.489.274.847.
Surplus/(Devisit)	(Rp. 60.000.000.000.)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 75.000.000.000.
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 15.000.000.000.
Pembiayaan Netto	Rp. 60.000.000.000.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)	Rp. 0

Apakah Kesimpulan tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD :

Dapat !

Pimpinan rapat :

(ketuk palu 1 kali) Terima kasih.

Selanjutnya kepada Saudara Sekretaris DPRD kami silahkan untuk membacakan rancangan Keputusan DPRD.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Kami tanyakan apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

Rapat DPRD :

Dapat !

Pimpinan rapat :

(ketuk palu satu kali) Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a, angka 3 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, kita perlu mendengarkan pendapat akhir Bupati Temanggung.

Namun sebelumnya perkenalkan kami Pimpinan DPRD bersama Bupati Temanggung untuk menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Untuk keperluan tersebut, Saudara Bupati Temanggung dan Pimpinan DPRD untuk menempatkan diri.

Hadirin dimohon untuk berdiri.

PENANDATANGAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

Penandatanganan Berita Acara selesai.

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Selanjutnya kami silahkan kepada Saudara Bupati Temanggung untuk menyampaikan Pendapat Akhirnya atas persetujuan DPRD Kabupaten Temanggung.

PENDAPAT AKHIR BUPATI TEMANGGUNG

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Pendapat Akhir Bupati Temanggung Atas Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati;

Bapak/Ibu Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang saya hormati;

Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Para Camat, dan Para Direktur BUMD yang saya hormati, Para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan-rekan pers serta hadirin yang berbahagia,

Mengawali pendapat akhir ini, saya mengajak hadirin sekalian, untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat kembali berkumpul untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan-Nya.

Selanjutnya, Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD atas terselenggaranya rapat paripurna ini guna membahas persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia,

Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, merupakan proses yang panjang dan kompleks. Cita-cita yang tinggi dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat ternyata tidak sepenuhnya diimbangi dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2020 mendatang, orientasi dari pelaksanaan program dan kegiatan haruslah berorientasi pada hasil, harus bisa dan mampu diterima dan dinikmati oleh masyarakat Temanggung.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat berterima kasih kepada Komisi-komisi DPRD, Badan Anggaran DPRD, TAPD dan Perangkat Daerah, atas pemahamannya dan kerja kerasnya guna membahas Raperda ini sehingga dapat kita setuju bersama sama sesaat tadi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Secara umum, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ini, menghasilkan postur anggaran yang memadai. Dari sisi pendapatan, merupakan target yang mampu direalisasikan dalam tahun berjalan, sedangkan dari sisi belanja, sudah mendasarkan pada skala prioritas dengan tetap mendasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah, terutama Silpa, merupakan prediksi yang realistis jika dilihat dari penyerapan APBD Tahun 2018 maupun penyerapan pada anggaran tahun berjalan ini.

Sebelum Saya mengakhiri Pendapat akhir ini, pada kesempatan ini Saya sampaikan pula bahwa:

1. Kepada Perangkat Daerah yang menangani pendapatan daerah, agar senantiasa meningkatkan kinerjanya sehingga rencana pendapatan daerah yang telah ditargetkan dapat terealisasi sehingga mampu menopang pembiayaan pembangunan.
2. Agar mempersiapkan segala dokumen perencanaan maupun pelaksanaan anggaran yang diperlukan, sambil menunggu evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Tengah.
3. Khusus untuk pelaksanaan APBD Tahun 2019, sudah memasuki bulan terakhir pelaksanaan, saya tekankan kembali untuk segera menyelesaikan target program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah, sehingga sampai akhir tahun anggaran dapat terselesaikan dengan baik dan berkualitas.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Kami menyadari bahwa upaya dalam membangun daerah ini bukanlah sebuah proses yang mudah. Tetapi satu hal yang harus kita pegang terus, bahwa upaya itu adalah upaya kita bersama, upaya yang tulus dan sungguh-sungguh demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, menuju Temanggung yang toto titi tentrem tentrem, marem lan gandem.

Atas masukan dan saran dari Fraksi-fraksi DPRD yang kita dengarkan tadi, serta pada saat proses pembahasan, saya sampaikan terima kasih dan akan menjadi bahan bagi kami dalam merumuskan kebijakan ke depan.

Demikian pendapat akhir saya atas persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 saya sampaikan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dalam upaya kita menjalankan roda pembangunan menuju masyarakat Temanggung yang lebih sejahtera.

Temanggung, 7 November 2019

Bupati Temanggung H. M. Al khadziq

Sekian, terima kasih.

Wassalamu `alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Pimpinan rapat :

Kepada Saudara Bupati Temanggung yang telah menyampaikan pendapat akhirnya kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disampaikannya Pendapat Akhir Bupati Temanggung sesaat tadi, maka selesailah sudah rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.

Melalui kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Komisi-Komisi DPRD, Badan Anggaran DPRD, Bupati Temanggung bersama TAPD dan jajaran SKPD yang telah mencurahkan waktu dan tenaga guna pembahasan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung dimaksud, sehingga dapat selesai tepat waktu sebagaimana yang direncanakan.

Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung dari awal hingga selesai.

Akhirnya teriring bacaan Alhamdulillahirrobbil'alamin, Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan ke I Tahun 2019 DPRD Kabupaten Temanggung hari ini Kamis 7 Nopember 2019 pukul 12.47 WIB. Dengan resmi kami tutup ----- ketuk palu 3 kali.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Temanggung, 7 Nopember 2019

Sekretaris Rapat

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001